

**PENYULUHAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
MASYARAKAT TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK  
PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR**

**Tubagus Rifqy Thantawi<sup>1</sup>, Bayu Purnama Putra<sup>2</sup>, Siti Evi Alfiah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

<sup>1</sup>trifqythan@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id,

<sup>3</sup>sitieviaalfiah16@gmail.com

**ABSTRACT**

*During the Covid-19 pandemic, all people felt its influence. The people around the Mount Halimun Salak National Park (GHSNP) are no exception, which is included in the Pamijahan District, Bogor Regency. This has added to the burden on the community, which previously often faced problems with the degradation of natural resources and the environment, the low economic status of the community and the increasing population in the GHSNP area. In this regard, community service activities in the form of counseling on sharia business management are carried out in the TNGHS community which is included in the Pamijahan District area. This community service is to provide enlightenment regarding Islamic economics and business and especially sharia business management. In addition to providing moral reinforcement in the midst of the Covid-19 pandemic.*

*Keywords: Sharia Business Management, Mount Halimun Salak National Park, Pamijahan, Bogor, Covid-19.*

**ABSTRAK**

Pada masa pandemi Covid-19, semua masyarakat merasakan pengaruhnya. Tidak terkecuali masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang termasuk berada dalam wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Hal tersebut semakin menambah beban masyarakat yang sebelumnya juga seringkali menghadapi masalah degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, rendahnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk di dalam Kawasan TNGHS. Berhubungan dengan itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan manajemen bisnis syariah dilakukan pada masyarakat TNGHS yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pamijahan. Pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pencerahan mengenai ekonomi dan bisnis Islam dan khususnya manajemen bisnis syariah. Selain itu memberikan penguatan moril di tengah pandemic Covid-19.

Kata-kata kunci: Manajemen Bisnis Syariah, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Pamijahan, Bogor, Covid-19.

## I. PENDAHULUAN.

Peningkatan kasus Covid-19 tidak hanya berpengaruh secara nasional di Indonesia, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kondisi sosial dan perekonomian pedesaan. Kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat yang ditempuh untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang mengarah pada masyarakat pedesaan, turut berpengaruh menghambat dan menekan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pengaruh tersebut tidak terkecuali pada masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang termasuk dalam Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. TNGHS yang diperluas dari  $\pm 40.000$  ha menjadi  $\pm 113.357$  ha (Departemen Kehutanan, 2003), secara administrasi pemerintahan, kawasan TNGHS termasuk di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Kabupaten Lebak.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan TNGHS sampai saat ini belum terpecahkan seperti, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, adanya pengembangan kampung adat kedalam kawasan, sengketa tata batas, rendahnya ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan meningkatnya jumlah penduduk di dalam kawasan (Balai TNGHS, 2007) serta konflik kepemilikan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam (Yatap, 2008).

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO Semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus covid-19 (sebayang, 2020). Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus

corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang (Aida, 2020). Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari (koesmawardhani,2020).

Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing*. Konsep ini untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. Namun banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak berkuliah atau bersekolah ataupun memberlakukan bekerja didalam rumah, namun kondisi ini malahan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur (Malik, 2020). Selain itu, walaupun Indonesia sudah dalam keadaan darurat masih saja banyak berkumpul ribuan orang di satu tempat, yang jelas dapat menjadi mediator terbaik bagi penyebaran virus corona dalam skala yang jauh lebih besar. Permasalahan tersebut seringkali berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar TNGHS yang rendah (Dunggio & Gunawan, 2009).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar TNGHS, diperlukan setidaknya penyuluhan secara terus-menerus (dalam hal yang minimal) atau pemberian permodalan dan sarana prasaranan perekonomian bagi masyarakat (dalam hal yang maksimal).

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### II.1. Perluasan TNGHS dan Berkurangnya Sumber Penghidupan Masyarakat.

Di dalam TNGHS yang termasuk dalam Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masih terdapat masyarakat miskin di dalam dan di sekitar hutan. Pada tahun 2006 jumlah rumah tangga (RT) miskin yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan TNGHS sebanyak 68.113 RT (Balai TNGHS, 2007). Keberadaan masyarakat sekitar hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Hamid *et al.*, 2011). Konsekuensi dari perluasan taman nasional adalah hilangnya hak akses masyarakat untuk dapat menggarap lahan pertanian yang sudah lama dilakukannya (Rahmawati *et al.*, 2008). Pengelolaan sumberdaya hutan perlu dilakukan dengan berorientasi ekosistem secara keseluruhan (Junaedi & Maryani, 2013) dan berdasarkan pada sifat alami hutan (kondisi biofisik hutan) serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan (Kartodihardjo, 2013).

Sementara itu, Marwa *et al.*, (2010) mengemukakan bahwa pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan. Keberhasilan pengelolaan TNGHS tidak terlepas dari sikap dan dukungan masyarakat (Kadir *et al.*, 2012). Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan akan sulit terwujud jika tidak diimbangi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan TNGHS (Adiprasetyo *et al.*, 2009).

Pemahaman permasalahan sosial

ekonomi masyarakat di sekitar TNGHS sangat diperlukan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengelolaan TNGHS (Kadir *et al.*, 2012). Menurut Junaedi & Maryani (2013), terdapat hubungan yang erat antara keberadaan hutan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kondisi biofisik (lingkungan).

### II.2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat TNGHS.

Karakteristik individu masyarakat merupakan ciri khas yang melekat pada individu yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan individu yang bersangkutan. Masri (2010) dan Watung *et al.*, (2013) mengemukakan bahwa karakteristik sosial masyarakat meliputi tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status sosial, jumlah tanggungan keluarga, tingkat kesehatan dan umur.

Menurut penggolongan kelas umur (Mantra, 2000), sebagian besar masyarakat tergolong pada usia produktif, maka menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sangat berpotensi untuk beraktivitas secara maksimal, memiliki semangat dan kreatif mencari berbagai usaha yang dapat menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Tingkat umur sangat memberikan pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan ini terkait dengan kondisi fisik, cara berpikir dan kemampuan untuk bekerja. Kadir (2005) mengemukakan bahwa petani yang berusia muda (usia produktif) pada umumnya mampu menerima dengan cepat inovasi atau pun ide-ide baru yang dianjurkan dibandingkan petani yang berusia tua (tidak produktif). Oleh karena itu potensi umur produktif ini perlu dimanfaatkan.

Jumlah anggota keluarga pada setiap rumah tangga masyarakat memberikan gambaran mengenai

ketersediaan tenaga kerja, tanggungan hidup keluarga dan besarnya pendapatan keluarga (Mulyono, 2012). Jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi semangat dan kreativitas kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Kadir *et al.*, 2012). Bila ditinjau dari jumlah tanggungan keluarga, yaitu rata-rata keluarga di dalam masyarakat mempunyai tanggungan berjumlah tiga jiwa, berarti satu kepala keluarga petani harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup empat orang anggota keluarganya. Namun, apabila anggota keluarga dimanfaatkan dengan optimal, keluarga yang besar merupakan sumber tenaga kerja potensial yang dapat meringankan beban kepala keluarga (Pujowati *et al.*, 2010).

Mengenai pendidikan, maka pendidikan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi pendidikan formal dan non formal. Tujuan pendidikan formal dan non formal adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan, keterampilan dan juga sikap masyarakat (Marwoto, 2013). Pendidikan formal merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan petani dalam menerima inovasi baru (Waluyo *et al.*, 2010). Tingkat pendidikan formal mempunyai peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat dalam bertindak. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sulit untuk menerima hal-hal baru atau inovasi yang dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan (Kadir, 2005). Ristianasari *et al.*, (2013) mengemukakan bahwa pendidikan formal dan non formal (pelatihan) mempunyai korelasi atau hubungan dengan kemandirian masyarakat. Proses pemberdayaan dapat berjalan lancar apa bila pendidikan non formal yang diberi kan berkaitan dengan profesi dan potensi sumberdaya lokal.

### III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan manajemen bisnis syariah dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 di Desa Gunung Sari dan Desa Purwabakti yang termasuk dalam Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang keduanya terletak di dalam dan di sekitar kawasan TNGHS.

Pengabdian kepada masyarakat ini didahului dengan pendekatan komunikasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19. Kemudian dilakukan penyuluhan manajemen bisnis syariah pada tempat yang representatif di kedua desa tersebut.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

#### IV.1. Karakteristik Sosial Individu Masyarakat Sekitar TNGHS.

Karakteristik masyarakat umumnya beragama Islam (mendekati 100%) dan semuanya beretnis Sunda (mendekati 100%). Kehidupan beragama adalah suatu hal yang hakiki, karena menyangkut ketenangan batin dan berpengaruh dalam perilaku kehidupan sehari hari.

Mayoritas masyarakat dengan tingkat pendidikan formal tergolong rendah, yaitu hanya berpendidikan dasar (SD) dan sedikit sekali dengan tingkat pendidikan sedang (SLTP-SLTA). Selain itu, masih terdapat kepala keluarga yang tidak menamatkan pendidikan dasar (SD). Indikator tingkat pendidikan formal menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia di sekitar kawasan TNGHS mayoritas dalam kategori rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diakibatkan adanya keterbatasan biaya, sarana dan prasarana. Hal ini terlihat dari

minimnya sarana pendidikan, jumlah sekolah dan guru yang terbatas. Sekolah lanjutan hanya ada di pusat kecamatan dengan jumlah yang terbatas. Jarak yang jauh juga menjadi penghambat bagi masyarakat untuk bersekolah.

Biaya yang tinggi dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah merupakan penyebab utama masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atau perguruan tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan masyarakat tidak punya pilihan pekerjaan lain kecuali bekerja sebagai petani. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang (Syarif, 2010; Kadir *et. al.* 2012). Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pendapatan petani, karena pengelolaan lahan hanya berdasarkan naluri dan pengalaman yang turun temurun tanpa adanya penerapan inovasi baru.

Hamid *et al.*, (2011), bila tingkat pendidikan masyarakat rendah maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah karena tingkat pendidikan berhubungan dengan pendapatan masyarakat. Garsetiasih (2012) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah diperlukan upaya pemberdayaan. Pendidikan non formal masyarakat diperoleh dari berbagai pelatihan, kursus atau bimbingan teknis yang pernah diikuti. Sebagian besar masyarakat tergolong dalam kategori rendah, yaitu tidak pernah atau hanya maksimal tiga kali mengikuti pendidikan non formal. Oleh karena itu perlu usaha-usaha untuk mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan seperti kegiatan pelatihan, kursus atau bimbingan teknis. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari pendidikan non formal dapat mengubah pola pikir dan pengambilan keputusan dalam masyarakat (Rinawati,

2012). Tingkat kesehatan adalah salah satu indikator dari produktivitas. Kesehatan merupakan faktor yang mendukung aktivitas petani dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Jika masyarakat memiliki kesehatan yang baik, maka tingkat kinerjanya juga akan baik dan begitu pula sebaliknya (Marwoto, 2013).

Mayoritas masyarakat merupakan penduduk asli yang telah bermukim di desa penelitian sejak lahir. Tingkat migrasi penduduk sangat kecil, biasanya terjadi karena ikatan pernikahan dengan penduduk setempat. Penduduk asli yang sudah lama tinggal memunculkan keterikatan akan daerah yang dihuninya dan terhadap pemanfaatan sumberdaya lahan di sekitarnya (Hamid *et al.*, 2011). Status sosial menunjukkan tingkat penghargaan masyarakat pada individu yang bersangkutan dalam kelompok masyarakat (Saputro, 2013). Rinawati (2012) menyatakan bahwa luas kepemilikan lahan, ketokohan, pekerjaan sebagai pegawai pemerintah dan tingkat pendapatan menentukan status sosial seseorang terutama di daerah pedesaan. Seseorang dianggap memiliki status sosial rendah jika memiliki lahan yang sempit, pendapatan yang rendah, bukan tokoh masyarakat/adat/agama dan bukan pegawai pemerintah. Seseorang dianggap memiliki status sosial sedang jika memiliki lahan dan pendapatan diantara rata-rata masyarakat di sekitarnya dan atau tergolong tokoh masyarakat/adat/agama atau pegawai pemerintah.

Masyarakat yang memiliki status sosial tinggi yaitu orang kaya, pendapatannya di atas rata-rata masyarakat di sekitarnya, memiliki lahan yang luas dan/atau tokoh masyarakat/adat/agama atau pegawai pemerintah. Status sosial umumnya ditentukan oleh kedudukan seseorang didalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat memiliki status sosial yang rendah. Bahwa secara umum masyarakat

sebagai petani memiliki status sosial yang rendah.

#### **IV.2. Karakteristik Ekonomi Individu Masyarakat Sekitar TNGHS.**

Masyarakat yang tinggal di sekitar TNGHS umumnya mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Hal ini dikarenakan lahan Kawasan TNGHS yang dikelola masyarakat berupa perkebunan. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat seperti tersebut di atas menggambarkan tingkat ketergantungan masyarakat sekitar TNGHS yang tinggi akan sumberdaya lahan. Hal yang perlu dilakukan adalah mengarahkan dan membina masyarakat melalui penyuluhan, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selain mempunyai pekerjaan utama, sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sampingan. Jenis mata pencaharian sampingan masyarakat bervariasi, yaitu buruh tani/bangunan, pedagang/wiraswasta, penyadap getah pinus atau aren, supir ojeg, beternak dan lainnya. Namun masih banyak pula masyarakat yang hanya mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian sebagai pekerjaan utama dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Oleh karena itu perlu pengembangan keterampilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat supaya tidak hanya mengandalkan pendapatan dari penggunaan lahan.

Luaslahan garapan merupakan luas keseluruhan lahan yang digarap masyarakat untuk tujuan produksi, baik lahan milik sendiri maupun lahan TNGHS. Lahan garapan yang dikelola/digarap masyarakat berupasawah dan atau kebun. Adi prasetyo *et al.*, (2009) mengemukakan bahwa luas kepemilikan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam.

Permasalahan yang dihadapi petani dalam mendukung mata pencaharian mereka antara lain terbatasnya lahan pertanian (Maryudi & Krott (2012). Oleh karena itu penggunaan lahan di kawasan TNGHS, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, merupakan satu-satunya sumber pendapatan/mata pencaharian dalam menopang kebutuhan rumah tangga mereka. Subarna (2011) mengemukakan bahwa luas lahan milik yang sempit menyebabkan pendapatan petani sangatrendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mereka memperluas usaha taninya melalui Garapan di hutan yang berbatasan dengan desanya. Penggunaan lahan kawasan TNGHS oleh masyarakat berupa sawah dan atau kebun dengan luas lahan yang bervariasi. Pada dasarnya pemanfaatan lahan kawasan TNGHS bertentangan dan melanggar hukum, namun karena sudah berlangsung sejak sebelum adanya penunjukkan kawasan, maka pihak pengelola taman nasional memberikan kebijakan dengan memperbolehkan penggarapan lahan tetapi tidak diperkenankan adanya perluasan. Hasil studi yang dilakukan Galudra *et al.*, (2005) didapatkan bahwa pada beberapa bagian kawasan hutan yang ditunjuk telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Tingkat ketergantungan terhadap lahan akan semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk di dalam dan di sekitar kawasan TNGHS. Gunawan *et al.*, (2013) juga mengemukakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap lahan untuk usaha tani di kawasan taman nasional

#### **IV.3. Penyuluhan Manajemen Bisnis Syariah.**

Dengan karakteristik sosial individu dan ekonomi masyarakat sekitar TNGHS yang sebagian besar termasuk dalam menengah ke bawah, maka dapat diperkirakan beratnya pengaruh pandemi

Covid-19.

Oleh karenanya komunikasi baik sebelum maupun saat dan setelah penyuluhan manajemen bisnis syariah ialah komunikasi yang menenangkan yang berlandaskan pada ke-Islaman sesuai keyakinan yang dipeluk masyarakat sekitar TNGHS. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa Islam sebagai pandangan hidup yang sempurna termasuk juga ekonomi dan bisnis syariah terkhusus manajemen bisnis syariah.

Ekonomi dan bisnis Islam, termasuk manajemen bisnis syariah, tidak hanya terfokus pada keuntungan semata namun dijalankan karena niat ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kerangka itu, manajemen bisnis syariah membuat bisnis yang dijalankan dengan sistem syariah akan terasa aman, nyaman, terjamin, selain itu memiliki kualitas dalam memberikan layanan kepada para masyarakat muslim.

Dengan demikian, diharapkan dengan memberikan ketenangan kepada masyarakat mengenai ekonomi dan bisnis Islam, serta manajemen bisnis syariah, masyarakat termotivasi juga untuk mengikuti upaya pencegahan penularan Covid-19. Masyarakat dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk tetap produktif sesuai manajemen bisnis syariah.

Pemberikan pemahaman syariah dan manajemen bisnis syariah kepada masyarakat dapat menghilangkan rasa khawatir masyarakat untuk tetap produktif di masa pandemi, yang diharapkan dapat meningkatkan geliat ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, produktivitas masyarakat dapat tetap membantu meningkatkan kegiatan perekonomian berdasarkan manajemen bisnis syariah.

## V. SIMPULAN.

Kondisi sosial masyarakat di sekitar Kawasan TNGHS termasuk dalam kategori masyarakat desa dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Mayoritas masyarakat berusia produktif dan merupakan penduduk asli setempat dengan kondisikesehatan yang prima serta status sosial yang rendah.

Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNGHS termasuk dalam kategori masyarakat desa dengan tingkat pendapatan rendah, Dengan demikian tingkat pendidikan formal masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan TNGHS perlu ditingkatkan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan dan lahan TNGHS, peran masyarakat dalam pengelolaan TNGHS perlu ditingkatkan melalui penyuluhan konservasi, *agroforestry* dan pelatihan peternakan.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan penyuluhan manajemen bisnis syariah sedikit banyak mampu memicu motivasi masyarakat untuk tetap berproduktif sesuai ajaran Islam, dan mampu memberikan ketenangan untuk perbaikan hidup yang lebih baik lagi di masa dan pasca pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai TNGHS. (2007). *Rencana pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak periode 2007-2026*. Kabandungan (ID) : B TNGHS.
- Departemen Kehutanan. (2003). Keputusan Menteri Kehutanan No.175/kpts-II/2003 tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun

(TNGH) berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dari 40.000 Hektar menjadi 113.357 Hektar.

- Dunggio, I. & Gunawan, H. (2009). *Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 6 (1) : 43-56. Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
- Galudra, G., Sirait, M., Rhamdaniaty, N., Soenarto, F. & Nurzaman, B. (2005). *History of Landuse and Degradation of Mount Halimun Salak National Park*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 11 (1) : 1-13. Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Garsetiasih, R. (2012). *Manajemen Konflik Konservasi Banteng (*Bos javanicus* d'Alton 1832) dengan masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur* [disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 218 hal.
- Gunawan, H., Bismark, M. & Krisnawati, H. (2013). Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar sebagai Dasar Penetapan Tipe Penyangga Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 10 (2) : 103-117. Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor.